



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 562/SEK/PL.02/2/2021 Jakarta, 18 Februari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah
TA 2021.

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di-
tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-3/KN/KN.2/2021 tanggal 29 Januari 2021 hal Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah Tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan RI bersama Kementerian ATR/BPN RI dengan DIPA Kementerian ATR/BPN RI, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut terkait dengan peratausahaan Aset BMN berupa tanah pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya :

1. Sertifikasi BMN berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum tanah, melaksanakan tertib administrasi tanah, mengamankan fisik tanah.
2. Barang Milik Negara berupa tanah yang dimiliki, tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMANTAP, digunakan untuk kegiatan operasional tugas dan/atau dinas jabatan serta dikuasai oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia harus memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa **Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI;**
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI sedang mengusahakan target sertifikasi BMN berupa tanah di tahun 2021 dan diperoleh data dengan jumlah bidang sebanyak 27.889 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) bidang pada 38 Kementerian/Lembaga, dimana Mahkamah Agung RI adalah salah satu Kementerian/Lembaga yang masuk ke dalam target program sertifikasi tanah tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) bidang pada 10 (sepuluh) wilayah dan 15 (lima belas) satuan kerja (terlampir);
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, guna memastikan kelancaran dan suksesnya kegiatan pensertipikatan BMN, agar dapat memperhatikan beberapa hal berikut ini :
 - a) Kepada satuan kerja yang bidang tanahnya masuk ke dalam daftar nominatif pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 untuk dapat menyiapkan kelengkapan dokumen pensertipikatan BMN dan segera berkoordinasi dengan KPKNL/Kanwil DJKN dan Kantor Pertanahan/Kanwil Kementerian ATR/BPN setempat;
 - b) Memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk persiapan maupun pendampingan lapangan kegiatan pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 yang tersedia pada RKAKL satuan kerja atau dapat berkoordinasi kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
 - c) Kepada satuan kerja tingkat banding yang menjadi Kordinator Wilayah agar dapat turut serta melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Aset BMN berupa tanah terhadap satuan kerja dengan berkoordinasi kepada satuan kerja, mitra KPKNL satuan kerja dan/atau kantor pertanahan BPN/ATR setempat berdasarkan bidang tanah yang masuk target sertifikasi Kementerian Keuangan RI;

- d) Terkait rencana pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah di lapangan yang melibatkan pihak kantor pertanahan BPN/ATR setempat, kepada Kuasa Pengguna Barang satuan kerja yang bidang tanahnya masuk ke dalam daftar nominatif pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 dapat berkoordinasi dengan **PIC** terkait Sertipikasi Aset BMN berupa tanah pada Biro Perlengkapan BUA dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara antara lain :
- Kabag Inventarisasi Kekayaan Negara
Yudi Cahyadi, S.T. (HP nomor 0878-2430-6064)
 - Kasubbag Pendataan
M. Sam Umar Wiraharja, S.Kom (HP nomor 0812-9392-8218)
 - Kasubbag Pembukuan dan Neraca
Dimas Aryo Putra, S.E. (HP nomor 0856-7874-614)
 - Kasubbag Statistik dan Pelaporan
Arif Setiadi, S.H. (HP nomor 0812-1021-1811)
5. Apabila bidang tanah yang dimiliki satuan kerja yang masuk target sertipikasi Kementerian Keuangan RI saat ini sudah memiliki dokumen bukti kepemilikan berupa **Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** agar dapat menyampaikan dan berkoordinasi dengan mitra KPKNL satuan kerja dan/atau kantor pertanahan BPN/ATR serta menyampaikannya kepada **PIC** Sertipikasi Aset BMN berupa tanah pada poin 4d diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat;
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Koordinator Wilayah Jawa Timur;
6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Koordinator Wilayah Sumatera Utara;
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah Riau;
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah;
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan;
10. Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
11. Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar selaku Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat;
12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Koordinator Wilayah Maluku; ✓
13. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Koordinator Wilayah Bengkulu;
14. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
15. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
16. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 562/SEK/PL.02/2/2021

Tanggal : 18 Februari 2021.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
2. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur;
3. Ketua Pengadilan Negeri Garut;
4. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;
8. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
9. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru;
10. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
11. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta;
12. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa;
13. Ketua Pengadilan Negeri Watampone;
14. Ketua Pengadilan Negeri Ambon
15. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

**REKAPITULASI JUMLAH BIDANG DAFTAR NOMINATIF
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN BMN BERUPA TANAH TA 2021
PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA**

No	Wilayah	KPKNL	Kantor Pertanahan BPN/ATR	Kode Sarker	Nama Sarker	Kode BMN	Uraian BMN	NUP	Kode SIMANTAP	Luas (m ²)	Kategori	Letak/Posisi/Alamat			Alas Hak	Koordinat Sentral Lokasi Aset		Keterangan
												Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota		X (meter)	Y (meter)	
1	Jawa Barat	Bojor	Kab. Ciamis	0050102009766000	Pengadilan Negeri Ciamis	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	6	31B0NDHAM	300	1	Pamoyanan	Ciamis	Ciamis	Akta Jual Beli	107.13031	6,02339509	
2	Jawa Barat	Tasulanaya	Kab. Garut	00501020097542000	Pengadilan Negeri Garut	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	6	3SA0VYIXQ	546	1	Sukakarya	Tarung	Garut	Surat Pernyataan	-7.2234	107.89713	Tanah Rumah Dinas
3	Jawa Timur	Ambur	Kab. Banyuwangi	005010400401369000	Pengadilan Agama Banyuwangi	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3UR0LPISG	1.600	1	Jl. A. Yani No 106 Banyuwangi		Banyuwangi	Akta Jual Beli			Data Dst. HMN Yang Telah Diverifikasi
4	Jawa Timur	Ambur	Kab. Bondowoso	00501040098192000	Pengadilan Negeri Bondowoso	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	41N0N0K1J	350	1	Jalan Jend. Soeparto Yudhithiryo No. 08		Bondowoso	Kuifansi			Data Dst. HMN Yang Telah Diverifikasi
5	Sumatera Utara	Kisaran	Kab. Labuhan Batu	005010700998675000	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	XZ15H1Y5	2.000	1	Jl. Sei. Tumor No. 36	Rantau Utara	Labuhanbatu	Surat Pernyataan			
6	Sumatera Utara	Kisaran	Kab. Labuhan Batu	005010700998675000	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	31Y324W	600	1	Jl. Cui Nyak Dahan No.32	Rantau Utara	Labuhanbatu	Surat Pernyataan			
7	Riau	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	005010900662990000	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3UZ143CX1	20.000	1	DHSA RAMBAH TENGAH UTARA	RAMBAH	Rokan Hulu		100.40.36.31	0.32.31.43	
8	Riau	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	005010900662990000	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2010101005	Tanah Bangunan Meso/Wisma/Awaras	1	3UZ13WYZZ	9.878	1	DHSA RAMBAH TENGAH UTARA	RAMBAH	Rokan Hulu	Surat Keterangan	100.11.28.6	0.33.7.25	
12	Kalimantan Tengah	Pangkalan Harau	Lamandau	005011400401919000	Pengadilan Negeri Nanga Duhuk	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	31Y0Y659M	1.421	1	Taqin Hini	Lamandau	Lamandau		111.31509	-1.206235	Carry over 2020
9	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kab. Kotabaru	005011500307122000	Pengadilan Agama Kotabaru	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	belum tercatat	7.604	1	STAGEN	PULAU LAUT UTARA	Kotabaru				Carry Over 2020
10	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	005011500670206000	Pengadilan Negeri Hatuficen	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	41.00R3Y2E	11.194	1	Gunung Amasari	Simpang Empat	Tanah Bumbu	HAST Hibi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	-3,404352	115.991749	
11	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	005011500670206000	Pengadilan Negeri Hatuficen	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	XZ11H1Y5	5.986	1	Gunung Amasari	Simpang Empat	Tanah Bumbu	HAST Hibi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	-3,406048	115.99179	
13	Kalimantan Timur	Bontang	Kab. Kutai Timur	005011600662986000	Pengadilan Negeri Sangatta	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1		700	3	Jalan Sockarno Hatta	Singa Gembura	Sangatta Utara	hibah Penda			
14	Sulawesi Selatan	Makassar	Gowa	00501190099439000	Pengadilan Negeri Sungguminasa	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2		540	1	HDS. COKROAMINOTO NO.4		Gowa	Surat Keterangan			
15	Sulawesi Selatan	Makassar	Gowa	00501190099439000	Pengadilan Negeri Sunggaminasa	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	7		633	1	ANIR TONRO		Gowa	Surat Keterangan			
16	Sulawesi Selatan	Pare Pare	Bone	00501190099532000	Pengadilan Negeri Watampene	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	3370VZKTA	276	1			Bone	Hibah			
17	Maluku	Ambon	Maluku Tengah	005012100099706000	Pengadilan Negeri Amboi	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	31S0R0F2F	1.000	1	JLN Dr. MOHAMMAD HATTA	HANDA	Maluku Tengah	Surat Keterangan			Tidak Sengketa
18	Maluku	Ambon	Kota Ambon	005012100099691000	Pengadilan Tinggi Ambon		1 (SATU) UNIT RUMAH DINAS DI ATAS TANAG INI		31Y0T7P8V	400	1	Jl. DR. MALAHOLLO	NUSANIWE	Ambon	BEBITA ACARA SERAH TERIMA DARI HUKUM DAN HAM SERTA SURAT AKTA JUAL BELI			Tidak Sengketa
19	Bengkulu	Bengkulu	Kota Bengkulu	005012600400110000	Pengadilan Negeri Bengkulu	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	31Z0XWING	2.500	1	Jl. S. Parnan No.05 Padang Jati Kota Bengkulu		Bengkulu	HAST			

Data Sumber : Daftar Nominatif Sertifikasi BMN Kementerian Keuangan RI untuk bidang tanah Mahkamah Agung RI yang diolah



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA *0710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 34831324 FAX. (021) 3448390; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-3/KN/KN.2/2021 29 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Penyampaian Daftar Nominatif Bidang Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2021

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama jajaran Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah pada tanggal 7-8 Desember 2020, dengan agenda utama pembahasan Daftar Nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada poin 1, diperoleh data jumlah bidang yang akan disertipikatkan pada tahun 2021 sebanyak 27.889 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) bidang tanah pada 38 (tiga puluh delapan) Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia (rekapitulasi dan data detail terlampir).
3. Guna memastikan kelancaran dan suksesnya kegiatan pensertipikatan BMN, kami mohon bantuan Saudara agar:
 - a. Menginstruksikan kepada satuan kerja yang bidang tanahnya masuk dalam daftar nominatif pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 untuk menyiapkan kelengkapan dokumen pensertipikatan BMN dan segera berkoordinasi dengan KPKNL/Kanwil DJKN dan Kantor Pertanahan/Kanwil Kementerian ATR/BPN setempat;
 - b. Memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk persiapan maupun pendampingan lapangan kegiatan pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pensertipikatan BMN di lingkungan Saudara.
4. Dapat kami informasikan bahwa sesuai *road map* program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, diharapkan pada akhir tahun 2022 seluruh BMN berupa tanah sudah bersertipikat a.n. Pemerintah RI cq. K/L. Untuk itu kiranya satuan kerja melakukan identifikasi bidang tanah yang belum bersertipikat dan segera berkoordinasi dengan KPKNL/Kanwil DJKN setempat untuk diusulkan sebagai bidang indikatif program percepatan pensertipikatan BMN TA 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Barang Milik Negara



Ditandatangani secara elektronik
Encep Sudarwan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Sekretaris Jenderal Kekayaan Negara



Lampiran I Surat
Direktur BMN an. Dirjen KN
Nomor : S-3/KN.2/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

1. Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Direktur Utama/
Deputi/Jaksa Agung Muda/Asisten Logistik pada Kementerian/Lembaga
2. Yth. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/APIP pada
Kementerian/Lembaga
 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
 2. Mahkamah Agung RI
 3. Kejaksaan Agung
 4. Kementerian Sekretariat Negara
 5. Kementerian Dalam Negeri
 6. Kementerian Luar Negeri
 7. Kementerian Pertahanan
 8. Kementerian Hukum & HAM
 9. Kementerian Keuangan
 10. Kementerian Pertanian
 11. Kementerian Perindustrian
 12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 13. Kementerian Perhubungan
 14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 15. Kementerian Kesehatan
 16. Kementerian Agama
 17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 18. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 20. Kementerian Ristek/BRIN
 21. Badan Siber dan Sandi Negara
 22. Badan Pusat Statistik
 23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 24. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 25. Kepolisian Negara RI
 26. Badan Pengawas Obat dan Makanan
 27. Badan Narkotika Nasional
 28. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
 29. Komisi Pemilihan Umum
 30. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 31. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 32. Lembaga Administrasi Negara
 33. Arsip Nasional
 34. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 35. Badan Pengawas Pemilihan Umum
 36. Lembaga Penyiaran Publik RRI
 37. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
 38. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang



Lampiran II Surat
 Direktur BMN an. Dirjer KN
 Nomor : S-3/KN.2/2021
 Tanggal : 29 Januari 2021

**REKAPITULASI JUMLAH BIDANG DAFTAR NOMINATIF
 PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN BMN BERUPA TANAH TA 2021**

No	Kode BA	NAMA K / L	JUMLAH BIDANG NOMINATIF TA 2021
1	001	MPR RI	1
2	005	MAHKAMAH AGUNG	19
3	006	KEJAKSAAN RI	3
4	007	SEKRETARIAT NEGARA	7
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	11
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	812
8	013	KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA	31
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	41
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	106
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3
12	020	KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	8
13	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	646
14	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	54
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	12
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	325
17	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	27
18	032	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	19
19	033	KEMENTERIAN PUPR	25.194
20	042	KEMENTERIAN RISTEK/BRIN	19
21	051	BADAN SIBER & SANDI NEGARA	2
22	054	BADAN PUSAT STATISTIK	8
23	056	KEMENTERIAN ATR/BPN	1
24	059	KEMENTERIAN KOMINFO	1
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	343
26	063	BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN	3
27	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3
28	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, & GEOFISIKA	1
29	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11
30	079	LIPI	6
31	081	BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAN TEKNOLOGI	2
32	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4
33	087	ARSIP NASIONAL RI	1
34	112	BPKPBPB BATAM	98
35	115	BAWASLU	3
36	116	LPP RRI	1
37	117	LPP TVRI	7
38	118	BPKS SABANG	51
TOTAL			27.889

